

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA SOSROMENDURAN YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG PARIWISATA

NASKAH PUBLIKASI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Soeko Wicaksono Novianto
NIM : 20140610223
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

NASKAH PUBLIKASI

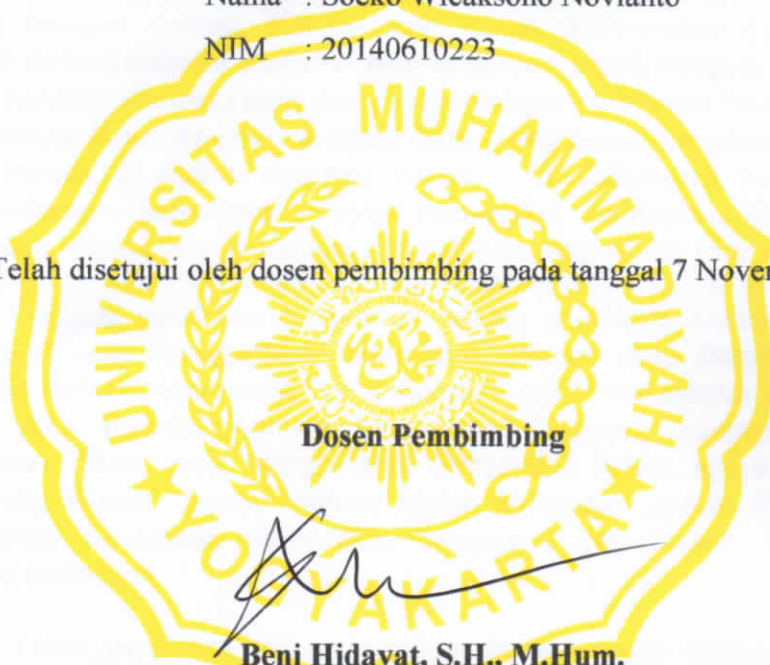
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA SOSROMENDURAN YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG PARIWISATA

Diajukan Oleh :

Nama : Soeko Wicaksono Novianto

NIM : 20140610223

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 7 November 2018.

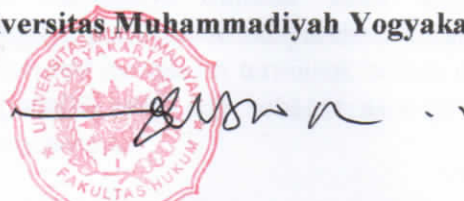


Dosen Pembimbing

Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK. 19731231199804153030

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA SOSROMENDURAN YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG PARIWISATA

Soeko Wicaksono Novianto

ABSTRAK

Kampung Sosromenduran adalah salah satu kampung wisata yang masuk dalam kategori rintisan. Hal ini tentu sangat disayangkan melihat Kampung Wisata Sosromenduran memiliki banyak potensi untuk menjadi kampung wisata yang mandiri. Pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) menjadi kunci yang harus dipegangoleh masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata. diberlakukanya konsep CBT atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadikan Kampung Wisata Sosromenduran menjadi kampung wisata yang mandiri. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Kesimpulan dari hasil penelitian faktor yang menghambat masyarakat dalam upaya pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran adalah kurangnya sumber daya masyarakat, kurangnya pendanaan masyarakat, kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pariwisata

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kampung Wisata.

I. PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah daerah otonomi setingkat propinsi di Indonesia dengan ibukota propinsinya adalah Yogyakarta, sebuah kota dengan berbagai predikat, baik dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam sektor kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja. Yogyakarta yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang sangat menarik di Jawa Tengah karena memiliki potensi wisata yang besar dan mempunyai ciri khas tersendiri, diantaranya adalah wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, wisata religi dan wisata olah raga, dan wisata kampung wisata. Keseluruhannya memiliki atraksi wisata yang berbeda. Salah satu obyek wisata yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah wisata Kampung Wisata.

Kampung wisata masih memiliki banyak potensi yang belum tergali maksimal untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus berupaya untuk memperbaikinya saat ini Yogyakarta memiliki 17 kampung wisata yang telah diresmikan langsung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tetapi hanya satu kampung saja yang masuk dalam kategori mandiri, sedangkan lima kampung wisatamasih dalam taraf rintisan dan 11 sisanya masih termasuk kampung

wisata kategori berkembang.¹ Kampung Sosromenduran adalah salah satu dari 17 kampung wisata yang telah dideklarasikan oleh pemerintah tetapi masih termasuk dalam kategori rintisan. Sosromenduran terletak di kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, secara fisik wilayah Kampung Sosromenduran dikenal sebagai kampung internasional karena sebagian besar di huni oleh wisatawan asing dibandingkan wisatawan domestik. Tempat ini biasa dikunjungi karena aksesnya yang dekat dengan pusat aktivitas keramaian Malioboro disamping itu banyak terdapat banyak tempat akomodasi penginapan seperti Hotel, Homestay, Wisma, Losmen. Hal ini tentu sangat disayangkan melihat Kampung Wisata Sosromenduran memiliki banyak potensi untuk menjadi kampung wisata yang mandiri dan dapat diminati banyak wisatawan, sehingga dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan aturan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan Kampung Wisata di Yogyakarta, aturan baru terkait kampung wisata ini ada dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata. Aturan kampung wisata tersebut memuat syarat teknis dan administrasi pendirian kampung wisata serta kategori kampung wisata, dibuatnya aturan tersebut

¹ Gardena P, Menulis Referensi dari Internet, 19 Desember 2018, <http://blog.reservasi.com/aturan-kampung-wisata-yogyakarta/>.(21:30).

adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta berkonsentrasi untuk menjual wisata berbasis kampung wisata di Kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki fungsi penting sebagai proses pembangunan nasional karena pariwisata selain meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan juga mampu membangun persatuan dan kesatuan serta mengenal budaya bangsa. Visi kepariwisataan Indonesia adalah menumbuhkan kesejahteraan dan perdamaian oleh karena itu pembangunan pariwisata harus mampu memberi manfaat secara adil bagi semua lapisan masyarakat, setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil pembangunan pariwisata sesuai dengan peran yang dilakukannya.² Pariwisata pada saat ini merupakan suatu kebutuhan mutlak manusia baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar tujuan daerah wisata, wisatawan butuh fasilitas dan pelayanan yang memadai sementara masyarakat sekitar lokasi akan mendapat implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, fenomena ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat di daerah tujuan wisata sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk menjadi sektor andalan dan unggulan yang secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasil devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

² Emik Rhayu, *Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Stiepari, Semarang, 2008, Hlm. 1

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan wisata dan didukung oleh fasilitas, jasa dan layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah oleh karena itu semua elemen harus bersama sama berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Pada prinsipnya pembangunan pariwisata dituntut mengaplikasikan tiga paradigma utama, yaitu:

1. *Economically Viable*, harus mampu meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. *Socially Acceptable*, harus mampu mewujudkan keadilan sosial, melestarikan serta memperkuat jati diri, kemandirian bangsa, memperkaya kepribadian, mempertahankan nilai nilai agama, serta berfungsi sebagai media menciptakan ketertiban dunia.
3. *Environmentally Sustainable*, harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkesinambungan.³

Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) menjadi kunci yang harus dipegangoleh masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata. Sebagai komponen utama dalam *community based tourism* (CBT), masyarakat peran

³*Ibid*, Hlm. 2

yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata, peran serta mereka dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata, pembangunan pariwisata sulit terwujud ketika masyarakat setempat merasa diabaikan, hanya sebagai objek, serta merasa terancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka.⁴ Masyarakat atau penduduk lokal dapat menjadi penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata lokal, konsep CBT dapat diterapkan dalam penyelenggaraan wisata petualang, wisata budaya dan wisata ekologi, sehingga model CBT sangat cocok untuk pelestarian sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun budaya. Dengan demikian diberlakukannya konsep CBT atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadikan Kampung Wisata Sosromenduran menjadi kampung wisata yang mandiri.

Berdasarkan uraian yang dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat masyarakat dalam upaya pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran?

⁴ Sugiarti, *Pengembangan Pariwisata*, Seminar Wisata Indonesia - Kamboja, 2004

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶ Pendekatan konseptual mengkaji dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum.

C. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam

⁵ Mukti Fajar. Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280

penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer/Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung pada lokasi penelitian. Adapun pengumpulan data pada penelitian lapangan ini dengan cara melakukan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dengan warga masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder/Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara

menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.⁸ Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Responden/Sampel Penelitian

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu:

1. Kepala Sekretariat Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta atau yang mewakili.
2. Masyarakat Kampung Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sejumlah 20 orang.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan dipilih secara acak. Dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta.

Upaya pertama yang akan dilaksanakan adalah pengembangan wisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh, Prinsipnya agar bagaimana membuat masyarakat juga merasakan efek positif dari keberadaan tempat wisata di daerahnya. Konsep itu berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melalui Badan Pariwisata bersama dengan beberapa pengelola obyek wisata, berikut ini adalah beberapa

bentuk kerja samanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga sekitar tempat wisata atau melibatkan mereka dalam upaya pengembangan lokasi destinasi wisata itu. Target pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam mencari potensi perekonomian masyarakat yang lebih baik dengan mempergunakan potensi budaya dan potensi fasilitas penunjang wisata yang telah tersedia.

Pengukuran partisipasi masyarakat dilihat dari derajat wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan digolongkan menjadi tingkatan non partisipasi, tokenisme dan *citizen power* oleh Arnstein. Berikut adalah penjelasan dari tangga partisipasi menurut Arnstein.⁹

Tabel 1

Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Tangga Partisipasi Arnstein.

Tangga Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan Oleh Pemerintah	Tidak Ada Partisipasi
Terapi	Sekedar agar masyarakat	Tidak Ada

⁹Wicaksono AM. 2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). [Skripsi]. Bogor [ID] : Institut Pertanian Bogor

<i>(Theraphy)</i>	tidak marah/mengobati	Partisipasi
Pemberitahuan <i>(Informing)</i>	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	sekedar justifikasi agar mengiyakan
Konsultasi <i>(Consultation)</i>	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	sekedar justifikasi agar mengiyakan
Penentraman <i>(Placation)</i>	Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan	sekedar justifikasi agar mengiyakan
Kemitraan <i>(Partnership)</i>	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Pendelegasian Kekuasaan <i>(Delegated Power)</i>	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Kontrol Masyarakat <i>(Citizen Control)</i>	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis khususnya di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran maka *Community Based*

Tourism Development atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) mampu menambah pendapatan masyarakat setempat sekaligus memelihara budaya, kesenian serta cara hidup masyarakat, jadi kekhawatiran budaya global akan merusak budaya masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa di kendalikan. Disamping itu CBT melibatkan pula masyarakat dalam tahap pembuatan keputusan dan dalam pendapatan sebagian besar secara langsung dari hadirnya para wisatawan, sehingga dengan ini CBT membuat kesempatan kerja baru, mengurangi angka kemiskinan dan membawa efek positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya setempat yang diharapkan pada akhirnya akan menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari meningkatnya kegiatan pariwisata.

Pelaksanaan CBT bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia seperti yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa penyelenggaraan pariwisata bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Menghapus kemiskinan.
4. Mengatasi pengangguran.
5. Melestarikan alam, lingkungan serta sumber daya.
6. Memajukan kebudayaan.

7. Mengangkat citra bangsa.
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Contoh signifikan peran masyarakat terhadap pengembangan industri pariwisata di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran seperti yang telah diuraikan di atas adalah dengan berjualan makanan di sekitar lokasi wisata, menyediakan jasa pemandu wisata, serta berjualan souvenir. Selain hal tersebut masyarakat juga diperlibatkan dalam kegiatan melestarikan, menjaga serta membersihkan lokasi Kampung Wisata Sosromenduran.

Perlu menjadi perhatian bahwa pada saat ini telah terjadi perubahan pola konsumsi wisatawan dunia atau *consumers behaviour pattern* jadi mereka tidak hanya mengutamakan bersantai dan menikmati suasana, saat ini pola konsumsi sudah mulai berubah ke jenis yang tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat dengan cara menikmati produk atau kreasi budaya dan peninggalan sejarah.

Daya tarik utama wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempatkan masyarakatnya sebagai elemen utama adalah sesuatu yang terus menerus dilakukan. Julukan "Indonesia Mini" untuk Kota Yogyakarta adalah gambaran awal dari keunggulan wisata Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan mengikuti saran pemerintah agar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, bersinergi dengan masyarakat setempat agar dapat memberikan dampak secara langsung khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta membangun dan memfasilitasi potensi wisata.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak lepas dari beberapa kendala yang menghambat masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran dalam pengembangan pariwisata antara lain adalah:

1. Sumber Daya Masyarakat (SDM) belum berkualitas.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berada di Kampung Wisata Sosromenduran menjadi kendala tersendiri yang rata-rata tingkat pendidikannya masih tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga beberapa masyarakat sulit untuk diberikan pengertian tentang pengembangan pariwisata.

Guna mengatasi kendala tersebut maka pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara progresif memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berada di Kampung Wisata Sosromenduran melalui tokoh masyarakat agar diharapkan

pemahaman serta pengetahuanya dapat diterapkan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang sudah memiliki kesibukan di bidang lain.

Banyaknya Sumber Daya Manusia yang memiliki pekerjaan lain dan disibukan dengan pekerjaan utamanya khususnya di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran menjadi penghambat pula dalam pengembangan pariwisata. Bisa dikatakan kecil kemungkinan untuk mereka yang sudah disibukan oleh pekerjaan tetap untuk terlibat secara langsung dalam pariwisata di daerah Kampung Wisata Sosromenduran.

Guna mengatasi kendala tersebut maka Sekretariat Kampung Wisata Sosromenduran berupaya untuk mengajak warganya yang belum memiliki pekerjaan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Wisata Sosromenduran.

3. Rendahnya pemahaman terhadap kepariwisataan berbasis masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat ini juga terjadi kepada masyarakat yang memiliki pendidikan rendah tetapi juga terjadi pada masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi. Ini semua dikarenakan sebagian besar masyarakat masih ragu untuk terlibat secara langsung atau berinvestasi dalam bidang pariwisata. Pada dasarnya masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi jangka

pendek karena dampaknya dapat dirasakan pada waktu yang singkat sedangkan dalam pariwisata pada umumnya berjangka panjang.

Guna mengatasi kendala tersebut pemerintah melalui Dinas Pariwisata Yogyakarta berupaya dengan memberikan pemahaman dan memberikan kemudahan perizinan dalam bidang pariwisata seperti izin mengadakan acara pertunjukan wisata dalam bentuk apapun.

4. Munculnya tempat-tempat wisata baru.

Dengan banyaknya tempat wisata yang baru menjadi tantangan tersendiri bagi warga Kampung Wisata Sosromenduran hal ini yang harus dipersiapkan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan wisata agar terus berinovasi dan mempromosikan lebih giat lagi agar tidak tertinggal dengan tempat wisata di daerah lain.

5. Kurangnya pendanaan oleh masyarakat.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Wisata Sosromenduran sedikit banyak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran sendiri. Meskipun pendapatan masyarakat sedikit meningkat tetapi masih dirasa kurang untuk mengembangkan usahanya yang telah ada. Untuk melakukan pengelolaan atau pelestarian tempat wisata masyarakat

masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah sedangkan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri masih belum memiliki dana yang berlebih untuk mengembangkan pariwisata.

Guna mengatasi kurangnya pendanaan dari masyarakat ataupun dari pemerintah ini maka pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata melakukan pendekatan kemasyarakatan yang mengajak masyarakat untuk berswadaya contohnya seperti mengajak masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki maupun membersihkan lokasi Kampung Wisata Sosromenduran.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran dalam upaya pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dan menyeluruh, melakukan pemberdayaan lokal agar dengan digunakannya budaya lokal yang telah ada dapat menunjang pembangunan pariwisata, yang berarti menurut tangga partisipasi

Arnstein bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung wisata sosromenduran masih dalam bentuk partisipasi saja belum sampai tahap menentukan.

2. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam upaya pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran adalah kurangnya sumber daya masyarakat, khusus nya masyarakat lokal, kurangnya pendanaan masyarakat, kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pariwisata itu sendiri termasuk belum optimal nya masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada sebagai aset produk wisata di daerah Kampung Wisata Sosromenduran, serta Sumber Daya Masyarakat yang masih sibuk dengan pekerjaan utamanya dan terkesan kurang tertarik dengan kegiatan pariwisata di daerah Kampung Wisata Sosromenduran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat masih banyaknya masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran yang belum mengetahui pengembangan pariwisata dan program pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka sudah seharusnya pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata melakukan sosialisasi dalam pengembangan obyek wisata dengan sistem CBT di Kampung Wisata Sosromenduran.

2. Guna mengatasi kendala dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat hendaknya pihak terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata harus lebih pro aktif dalam melakukan pembinaan dan pendekatan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisasmita Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Abu Huraerah, 2008, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, Bandung, Humaniora.

Dwiningrum S.I.A, 2015, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Emik Rahayu, 2008, *Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Semarang, Stiepari.

Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Konstanitas dan Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok FISIP UI Press, Jakarta.

Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008, *Community Development*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mardikanto, 2001, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Bandung, Pesona Abadi.

Marpaung Happy, 2000 *Pengetahuan Kepariwisata*, Bandung, ALFABETA.

Mubyarto, 1997, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta, Aditya Media.

Mukti Fajar Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ndraha Talizidhuhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Rineka Cipta.

Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa.

Nyoman S Pendit, 2003 *Ilmu Pengetahuan Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal :

Aziz, Y., Komaladewi, R., Indika, D. R., Shiratina, A., & Perisha, B. Potensi Pasar Melalui Penilaian Karakteristik Wisatawan Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*, 5(3), Vol.1, No.3, 2018.

- Devianti, Dea. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. eJournal Administrasi Negara. Vol.5, No.1, 2010.
- Ghani, Y. A. Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*. Vol.2, No.5, 2017.
- Hamzah, F., Hermawan, H., & Wigati, W. Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*. Vol.6, No.3, 2018.
- Jaelani, A. K. Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata*. Vol.8, No.3, 2018.
- Juwita, I., & Hariyanto, O. I. (2016). PENGARUH DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN NUSANTARA. *Jurnal Pariwisata*. Vol.2, No.6, 2016.
- Nawawi, A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol.2, No.3, 2013.
- Juwita, I., & Hariyanto, O. I. (2016). PENGARUH DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN NUSANTARA. *Jurnal Pariwisata*. Vol.2, No.6, 2016.
- Nawawi, A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol.2, No.3, 2013.
- Novianti, S., & Hariyanto, O. I. PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA PANTAI TANJUNG PENDAM SEBAGAI DAYA TARIK WISATA. *Jurnal Pariwisata*. Vol.5, No.9, 2016.
- Raharjana, D. T. Membangun pariwisata bersama rakyat: Kajian partisipasi lokal dalam membangun Desa wisata di dieng plateau. *Jurnal Kawistara*. Vol.3, No.1, 2012.
- Soeswoyo, D. M., Dewi, L., & Asaparini, P. S. Promosi Melalui Media Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Peranannya dalam Pariwisata Kota. *Jurnal Pariwisata*. Vol.2, No.4, 2018.
- Widiyanto, D., Handoyo, J. P., & Fajarwati, A. Pengembangan Pariwisata Perdesaan (Suatu Usulan Strategi bagi Desa Wisata Ketingan). *Bumi Lestari*. Vol.4, No.2, 2008.

Sumber Internet :

<http://www.infid.org>/diaksespada 10:30 WIB.

<http://www.buletinonline.com>/diaksespada 10:30 WIB.

<http://www.neliti.com>/diaksespada 10:30 WIB.